

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PROGRAM
SIARAN DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA SUMATERA SELATAN**
*Policy Implementation of Broadcast Program Standard on Public Broadcasting
Institution of the Television of Republic Indonesia of South Sumatera*

Nurmah Semil, Muzhar Apandi

ABSTRACT

Policy Implementation of broadcast program standard in this research, especially discussing about news programs that became one of the flagship programs of LPP TVRI South Sumatera is the Warta Sumsel's Program. Warta Sumsel's Program is one of the leading news programs from TVRI South Sumatra. As a flagship program, Warta Sumsel is expected to be a broadcast that adds insight and accurate information for the community. Therefore, it is important for the Warta Sumsel program to maintain the quality of news that is broadcasted while maintaining the content of the news in accordance with broadcast program standards as set forth in the Indonesian Broadcasting Commission Regulation No. 02 / P / KPI / 03/2012. The results showed that the South Sumatera KPID has performed its duties and functions well although it is still less than optimal. While many things that must be fixed at the agency LPP TVRI South Sumatra. Such facilities are still lacking, the systems that have been implemented need to be evaluated and improved, the appointment of bureaucrats that are not in accordance with professionalism work, and the authority often taken over by some elements.

Key Words : policy implementation, broadcast program, standard

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi tidak lagi membawa dampak positif bagi masyarakat tetapi juga menimbulkan dampak negative. Teknologi sering dipergunakan sebagai alat kepentingan kelompok tertentu untuk membentuk opini terhadap suatu permasalahan yang diinginkan. Media massa kini telah menunjukkan pengaruhnya, bukan hanya sekedar pengatur, tetapi telah menjadi ketergantungan bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang begitu besar akan media disatu sisi dan beragamnya media massa yang muncul disisi lain secara langsung maupun tidak langsung tercermin kepentingan-kepentingan yang tidak murni.

Media televisi sebagai media yang paling ekonomis dimiliki oleh setiap orang, sehingga melalui televisi dimaksudkan untuk membantu memberikan informasi dan hiburan pada publik, namun pada kenyataannya saat ini yang berkembang adalah berita yang dapat merusak moral bangsa mulai dari anak-anak, remaja, bahkan sampai orang dewasa. Televisi memang berpengaruh setidaknya menciptakan “*the similar general meaning*” atau makna umum yang mirip. Artinya, pemirsa akan mencoba memahami makna-makna tertentu dari tayangan-tayangan tersebut lalu melakukan sesuatu yang dianggap sama dalam konteks kehidupan sehari-hari.

TVRI sebagai satu-satunya televisi pemerintah telah memiliki stasiun daerah di hampir semua Provinsi di Indonesia, salah satunya di Sumatera Selatan.

Muatan siaran TVRI Sumatera Selatan adalah :

1. Isi siaran TVRI berorientasi pada pendidikan, kebudayaan dan kebangsaan.
2. TVRI mendukung nilai-nilai publik, struktur sosial masyarakat demokratis, serta hak asasi manusia.
3. TVRI mendukung nilai-nilai publik, struktur sosial masyarakat demokratis, serta hak asasi manusia.
4. TVRI berperan sebagai kekuatan dalam pencitraan keunggulan dan kekayaan Negara dan bangsa Indonesia.
5. TVRI berperan sebagai referensi bagi publik dalam mengantisipasi perubahan yang sangat cepat serta menjadi faktor perekat sosial dan integrasi individu, kelompok dan masyarakat.

Warta Sumsel sebagai salah satu program berita diharapkan dapat menjadi pengawal kepentingan publik yang independen, tidak tergantung pada dan tidak

dipengaruhi pihak lain. Serta harus mampu memberikan informasi yang bermanfaat dan menarik bagi masyarakat. Sejalan dengan nilai dasar yang dipedomani oleh TVRI Sumatera Selatan. Selain nilai dasar tersebut, program Warta Sumsel sebagai salah satu program jurnalistik juga harus memperhatikan standar program siaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Standar Program Siaran (kemudian disingkat SPS) diatur secara teknis dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012. Dalam salah satu Bab yaitu Bab XVIII yang khusus mengatur tentang Program Siaran Jurnalistik menyebutkan ada 6 bagian yang harus diperhatikan dalam program siaran jurnalistik, yaitu :

1. Prinsip-Prinsip Jurnalistik
2. Penggambaran Kembali
3. Muatan Kekerasan dan Kejahatan serta Kewajiban Penyamaran
4. Peliputan Terorisme
5. Peliputan Sidang Pengadilan, Kasus Hukum, dan Hukuman Mati;
6. Peliputan Bencana.

Keenam hal diatas merupakan bagian yang penting diperhatikan dalam penyanggahan setiap berita, yaitu berkaitan dengan kaidah, hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam penyanggahannya.

Ada beberapa penyanggahan Program Warta TVRI Sumsel yang terindikasi melanggar SPS yakni :

1. Warta Sumsel tanggal 26 Februari 2016. Berita terindikasi menyajikan gambar pelaku tersangka tidak disamarkan dan pistol petugas terlalu tampak. Hal ini melanggar SPS pasal 43;

2. Warta Sumsel tanggal 5 Januari 2016. Berita terindikasi menyajikan gambar narkoba tidak disamarkan dan ditayangkan berulang-ulang. Hal ini melanggar SPS pasal 26

Namun, KPID tidak melayangkan Surat teguran kepada TVRI secara tertulis untuk 2 pelanggaran tersebut karena dianggap masih terindikasi, sehingga tidak berdampak luas pada masyarakat. Hal ini menunjukkan kurangnya komunikasi antara KPID Sumatera Selatan dan TVRI. Seyogyanya, teguran harus tetap diinformasikan kepada pihak stasiun televisi agar dapat mengetahui kekeliruan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di lain waktu.

Selain itu, berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Produksi Berita TVRI Sumatera Selatan, ada pula kesalahan penayangan yang sampai mendapat teguran langsung dari pemirsa (penonton televisi) maupun dari pimpinan internal TVRI. Berita seremony pada tanggal 7 Mei 2016 yang menayangkan tentang “Temu Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya” mendapat komplain dari Eddy Yusuf karena berita yang tidak akurat dimana pada berita tertulis “Eddy Yusuf, turut mendapat izin untuk keluar tahanan”, sementara Eddy Yusuf memang telah keluar dari tahanan.

Ketidak akuratan data tersebut tentu telah melanggar prinsip-prinsip jurnalistik sebagaimana dituangkan dalam SPS pasal 40 yaitu berkaitan tentang prinsip-prinsip jurnalistik. Kesalahan seperti ini sesungguhnya tidak terjadi jika terjalin komunikasi yang baik antara reporter yang meliput berita dengan narasumber. Permasalahan ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, kurangnya komunikasi intern yang terjalin antara reporter dan kamerawan karena bisa jadi, berita tersebut hanya diliput oleh kamerawan saja, sehingga reporter sebagai pembuat berita kurang memahami situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Kedua, adanya

permasalahan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini reporter yang belum paham betul akan tugas dan kewajibannya dalam pembuatan berita serta bisa pula adanya keterbatasan pengetahuan reporter tentang pemerintah di daerahnya. Permasalahan ketiga dan cukup krusial adalah tidak jelasnya standar operasional prosedur dalam pengambilan sebuah berita sehingga menjadikan kurangnya komunikasi antara reporter dan kamerawan. SOP ini penting untuk menjabarkan posisi seseorang dalam sebuah pekerjaan, sehingga akan jelas siapa mengerjakan apa atau apa tanggung jawab siapa.

Berdasarkan Indikasi yang terjadi, sangat menarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan Standar Program Siaran pada penayangan Warta Sumsel di LPP TVRI Sumatera Selatan.

Tinjauan Pustaka

Suatu kebijakan adalah merupakan dokumen belaka, apabila tidak diimplementasikan. Untuk memahami lebih mendalam tentang konsep implementasi maka Van Meter dan Van Horn (dalam Fahmi, 2003:45) mendefinisikan Implementasi Kebijakan adalah *"encompasses those action by publik and provate individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in piour policy decisions"*.

Definisi tersebut memberi makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pendapat diatas, nampak bahwa proses implementasi meliputi:

1. Disahkannya Undang-undang dan diikuti oleh output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan oleh agen-agen yang mengimplementasikannya.
2. Ketaatan kelompok sasaran (target group) dengan kebijakan itu.
3. Pengaruh - pengaruh nyata baik yang dikehendaki atau tidak dari output kebijakan.
4. Pengaruh-pengaruh kebijakan sebagaimana dipersepsikan oleh agen pengambil kebijakan.
5. Perbaikan-perbaikan penting terhadap Undang-undang/kebijakan tersebut.
6. Model Implementasi Kebijakan dari Edwards III (Winarno, 1989: 88)

Model ini memperlihatkan adanya hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan, dalam rangka meraih kinerja yang baik diantara faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Model ini melihat implementasi kebijakan dari sisi pelaksana atau implementor, sehingga dapat diketahui bagaimana penyebab berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan.

Ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempatnya bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan seperti pendapat Edwards (dalam Tangkilisan, 2003: 11), mengatakan bahwa:

“Karena keempat faktor ini sedang beroperasi secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau bersifat merintangikan implementasi kebijakan, pendekatan yang ideal akan harus merefleksikan kompleksitasnya dengan membicarakan sekaligus.”

Komunikasi menjamin bahwa pelaksana yang harus mencapai suatu kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dengan sumber daya sebagai unsur kritis lain dalam implementasi kebijakan. Pentingnya disposisi untuk mengetahui sikap pelaksana yang terlibat dalam proses implementasi. Struktur birokrasi yang umum terjadi juga menjadi variabel yang penting, karena birokrasi merupakan salah satu badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan diukur dengan melihat *gap* (kesenjangan) antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program aksi atau proyek yang dijalankan. Dalam artian, apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan (hasil) yang direncanakan? Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi dapat dideteksi dari konten dan konteks kebijakan.

1. Komunikasi

Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan tersebut dapat diikuti. Penting adanya petunjuk untuk melaksanakan suatu kebijakan dan kemudian petunjuk tersebut dipahami dan dimengerti pula oleh orang banyak. Hal ini disamping untuk mempermudah pekerjaan juga untuk dapat menyamakan persepsi atau pandangan-pandangan semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi. Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administrasi untuk melakukan kebijakan secara efektif. Sementara itu, ada banyak hal yang mendorong

terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak buruk bagi implementasi kebijakan. Beberapa hal yang dimaksud adalah

a. Transmisi.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, seorang pejabat harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat, dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan dan tidak diabaikan.

Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi, yaitu :

- 1) Pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan.
- 2) Informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi.
- 3) Adanya persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

b. Kejelasan

Kejelasan yang dimaksud oleh George Edward III ini adalah petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

Ada 6 faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu :

- 1) Kompleksitas kebijakan publik,
- 2) Keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat
- 3) Kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan
- 4) Masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru
- 5) Menghindari pertanggungjawaban kebijakan
- 6) Sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

c. Konsistensi

Konsistensi menjadi syarat mutlak dalam implementasi kebijakan. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

2. Sumber-Sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi :

a. Sumber Daya Manusia (Staf)

Permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan staf atau sumber daya manusia, khususnya di Indonesia bukan pada kuantitasnya, tetapi lebih kepada kualitas dan rendahnya motivasi staf tersebut. Kurangnya personil yang terlatih dengan baik akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan yang menjangkau banyak pembaruan. Selain itu, motivasi kerja juga perlu ditanamkan secara positif, bahwa pekerjaan apa pun harus menunjukkan profesionalitas sesuai dengan profesi dan jabatan. Motivasi kerja dapat ditingkatkan misalnya dengan pemberian insentif atau tunjangan yang

memadai, kenyamanan lingkungan kerja, atau gambaran masa depan yang cerah. Permasalahan motivasi kerja ini tidak hanya terjadi pada kalangan pekerja muda saja, pekerja yang sudah puluhan tahun bahkan mungkin dapat lebih rentan terjangkit penyakit kurangnya motivasi ini.

b. Informasi.

Informasi mempunyai dua (2) bentuk, yaitu :

- 1) Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan.
- 2) Informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah.

Kurangnya informasi mengenai bagaimana mengimplementasikan beberapa kebijakan mempunyai konsekuensi secara langsung, yaitu :

- 1) Beberapa tanggung jawab secara sungguh-sungguh tidak akan dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi tepat waktu
- 2) Ketidakefisienan.

c. Wewenang.

Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke program lainnya, atau dari suatu badan ke badan lainnya. Dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat.

Lindblom (dalam Winarno, 2005:137) menyatakan bahwa kewenangan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya jika kita mengenal dua (2) jalur di mana berbagai orang menggunakan metode kontrol. Dua (2) jalur tersebut adalah :

- 1) Setiap kali bila orang ingin menggunakan berbagai metode kontrol, ia menerapkan berbagai metode kontrol (antara lain persuasi, ancaman dan tawaran keuntungan) terhadap orang-orang yang akan dikontrolnya;
- 2) Pihak pengontrol hanya kadang-kadang saja menggunakan metode itu untuk membujuk orang-orang yang dikontrolnya agar mentaati peraturan yang ada bahwa mereka harus tunduk terhadapnya.

d. Fasilitas-Fasilitas.

Penyediaan fasilitas-fasilitas yang layak untuk mendukung implementasi yang efektif tidaklah selalu mudah, namun menjadi penting. Sebanyak apa pun staf yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi, tidak akan dapat bekerja dengan efektif dan efisien tanpa adanya kelengkapan fasilitas dan sarana prasarana pendukung kegiatan.

3. Disposisi

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan kebijakan menjadi semakin sulit.

Menurut Edward III, banyak kebijakan masuk ke dalam zona ketidakacuhan. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

Dampak dari kekuatan birokrat sering membuatnya mengesampingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat tinggi. Lebih dari itu, para pelaksana akan cenderung melihat kepentingan organisasi mereka sebagai prioritas yang tinggi. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab munculnya perbedaan antara para pembuat keputusan puncak dan mendorong keefektifan implementasi kebijakan.

Kecenderungan memiliki dua (2) aspek penting, yaitu :

a. Pengangkatan birokrat.

Kecenderungan pelaksana menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Hanya yang menjadi persoalan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi, mengapa mereka tidak diganti dengan orang yang lebih bertanggung jawab kepada pimpinan ?.

Dalam hal ini, pemimpin menjadi sangat penting untuk mewujudkan tujuan dari suatu kepentingan, bukan kepentingan secara keseluruhan.

Kecenderungan seperti inilah yang akan sangat menghambat implementasi kebijakan yang efektif.

b. Insentif.

Mengubah personil dalam birokrasi pemerintah merupakan pekerjaan yang sulit dan tidak menjamin proses implementasi dapat berjalan lancar. Menurut Edwards III, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu barangkali akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana melaksanakan perintah dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Mereka tidak hanya berada dalam organisasi swasta yang lain bahkan di institut pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Secara khusus, ada enam (6) karakteristik birokrasi, yaitu :

- a. Birokrasi di manapun berada, dipilih sebagai instrument sosial yang ditujukan untuk masalah-masalah yang didefinisikan sebagai urusan publik.
- b. Birokrasi merupakan institut yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan, yang tingkat kepentingannya berbeda-beda untuk masing-masing tahap.
- c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks
- e. Birokrasi jarang mati, naluri untuk bertahan hidup tidak perlu dipertanyakan
- f. Birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan kebijakan mereka, tidak juga secara penuh dikontrol oleh kekuatan yang berasal dari luar dirinya.

Secara khusus, Edwards III mengungkapkan adanya 2 karakteristik utama birokrasi, yaitu:

- a. *Standard Operation Procedures* (SOP)

Salah satu aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi yang kompleks dan

tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

b. Fragmentasi

Fragmentasi mengakibatkan pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua (2) konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi yang berhasil.

- 1) Tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi tertentu karena tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan yang tepecah-pecah.
- 2) Pandangan-pandangan sempit dari badan-badan mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan memiliki fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan menentang kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Jadi, Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.

Standar Program Siaran bertujuan untuk :

1. Memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera;

2. Mengatur program siaran untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat;
3. Mengatur program siaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Program Warta Sumsel merupakan bagian dari program siaran jurnalistik. Sebagaimana dikatakan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/3/2012, program siaran jurnalistik adalah program yang berisi berita dan atau informasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik sebagai berikut :

1. Akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan.
2. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan/atau cabul;
3. Menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam liputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman.
4. Melakukan ralat atas informasi yang tidak akurat dengan cara:
 - a. Disiarkan segera dalam program lain berikutnya dalam jangka waktu kurang dari 24 jam setelah diketahui terdapat kekeliruan, kesalahan dan/atau terjadi sanggahan atas berita atau isi siaran;
 - b. Mendapatkan perlakuan utama dan setara;
 - c. Mengulang menyiarkan ralat tersebut pada kesempatan pertama dalam program yang sama.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian ini akan mengembangkan konsep implementasi yang menekankan pada model Edward III, serta menghimpun fakta yang berkaitan dengan standar program siaran dalam penayangan program berita Warta Sumsel.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai keadaan tertentu, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat terpisah-pisah untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini berkaitan dengan standar program siaran dalam penayangan program berita Warta Sumsel.

Fokus penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan Standar Program Siaran	Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi
	Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia b. Informasi c. Kewenangan d. Fasilitas
	Disposisi	a. Pengangkatan birokrasi b. Insentif
	Struktur Birokrasi	a. <i>Standard Operational Procedure (SOP)</i> b. Fragmentasi

Informan dalam penelitian ini diambil secara *purposive* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bersedia menjadi informan.
2. Komunikatif dan objektif dalam memberikan keterangan.
3. Individu yang mengetahui dan memahami layak tayangnya program Warta Sumsel.
4. Individu yang terlibat dalam pembuatan berita pada program Warta Sumsel

5. Individu yang memiliki *quality kontrol* dalam penayangan program Warta Sumsel.
6. Individu yang memperoleh manfaat langsung atas pemberitaan pada Program Warta Sumsel.

Berdasarkan kriteria-kriteria key informant yang telah dijabarkan di atas, maka key informant dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Berita LPP TVRI Sumatera Selatan;
2. Kamerawan berita LPP TVRI Sumatera Selatan;
3. Reporter Berita LPP TVRI Sumatera Selatan;
4. Produser pelaksana Program Warta Sumsel LPP TVRI Sumatera Selatan;
5. Editor program Warta Sumsel LPP TVRI Sumatera Selatan;
6. Kepala Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan;
7. Stakeholders.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dukungan data dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sub bab ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah secara panjang lebar dikemukakan pada sub bab sebelumnya. Analisa dilakukan secara kualitatif sehingga masing-masing indikator akan memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Secara garis besar, hasil penelitian implementasi kebijakan standar program siaran pada Program Warta Sumsel di LPP TVRI Sumatera Selatan dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini :

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan standar program siaran pada Program Warta Sumsel di LPP TVRI Sumatera Selatan ini melihat pada 3 hal, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

a. Transmisi

Transmisi yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan cara untuk mengkomunikasikan sebuah kebijakan atau dengan kata lain yang biasa digunakan oleh instansi baik pemerintah maupun swasta adalah sosialisasi. Sosialisasi seyogianya dilakukan oleh 2 lembaga yang terlibat yaitu KPID Sumatera Selatan dan LPP TVRI Sumatera Selatan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPID Sumatera Selatan dilakukan dengan beberapa cara yaitu : workshop, training, seminar atau kegiatan sejenis lainnya. Selain itu, KPID Sumatera Selatan juga memberikan buku tentang standar program siaran kepada setiap lembaga penyiaran yang ada di Sumatera Selatan. Akan tetapi, sosialisasi tersebut masih belum sampai pada pegawai di tingkat pelaksana, karena biasanya hanya diberikan kepada pimpinan saja.

Sosialisasi yang tidak sampai ini ditambah dengan kurangnya para pimpinan di LPP TVRI Sumatera Selatan memberikan sosialisasi khusus kepada pegawainya. Sosialisasi yang dilakukan di dalam lingkungan LPP TVRI Sumatera Selatan hanya sebatas ucapan atau lisan saja dan tidak ada pertemuan khusus yang membahas mengenai standar program siaran. Pegawai hanya diberikan buku panduan ketika melakukan kesalahan atau pertama kali menjadi pegawai LPP TVRI Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian, transmisi yang dilakukan dapat dikatakan belum berhasil.

b. Kejelasan

Kejelasan dalam penelitian ini adalah sejauhmana pihak-pihak yang berhubungan memahami kebijakan ini. Hal ini penting dalam pelaksanaan kebijakan dan keberlangsungan program itu sendiri. indikator kejelasan ini akan dinilai pada 2 aspek yang diteliti, yaitu pada pimpinan, dan kerabat kerja yang terlibat dalam penayangan Program Warta Sumsel itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, para pimpinan telah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPID, tentu telah mengetahui dan paham segala aturan yang tertuang dalam kebijakan standar program siaran tersebut.

Pegawai LPP TVRI Sumatera Selatan termasuk luar biasa, karena meskipun tidak ada sosialisasi yang dilakukan, tetapi pegawai mengetahui dan mengerti mengenai standar program siaran. Hal ini diperoleh dari buku pedoman atau panduan yang biasanya di berikan oleh KPID Sumatera Selatan meskipun jumlahnya terbatas.

Merujuk kepada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator kejelasan sudah berhasil dilakukan.

c. Konsistensi

Konsistensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan intensitas pelaksanaan sosialisasi pertahunnya, serta kesamaan persepsi dalam penegakan aturan yang sesuai dengan standar program siaran yang diinginkan. Artinya bahwa konsistensi akan melihat kembali pada pelaksanaan transmisi dalam bentuk sosialisasi yang diberikan baik oleh KPID Sumatera Selatan maupun secara intern TVRI Sumatera Selatan sendiri.

Konsistensi sosialisasi yang dilakukan oleh KPID Sumatera Selatan dapat dikatakan sudah berhasil. Hal ini melihat dari beberapa data yang diperoleh dimana kegiatan sosialisasi telah dilakukan secara berkala oleh KPID Sumatera Selatan, yaitu 1 kali dalam 1 tahun. Sementara, sosialisasi yang dilakukan oleh LPP TVRI Sumatera Selatan belum dilakukan secara intens, bahkan dinilai kurang. Hal ini berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dimana informasi mengenai kebijakan standar program siaran hanya didapat dari buku pedoman yang diberikan oleh KPID Sumatera Selatan saja.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dilihat dalam implementasi kebijakan standar program siaran pada Program Warta Sumsel di LPP TVRI Sumatera Selatan adalah dengan melihat kepada sumber daya manusia, informasi, kewenangan, serta fasilitas.

a. Sumber Daya Manusia

Ada 2 aspek yang dinilai dalam indikator sumber daya manusia ini, yaitu manajemen kepegawaian serta kualitas pegawai masing-masing. Hal yang perlu ditekankan dalam indikator sumber daya manusia ini adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan.

Pengelolaan pegawai di LPP TVRI Sumatera Selatan khususnya kerabat kerja program Warta Sumsel belum berhasil dikelola dengan baik. Pengelolaan ini dimulai dari rekrutmen pegawai, pelatihan, pemberian penghargaan hingga sanksi atas pelanggaran.

Pengelolaan pegawai dikatakan belum berhasil karena hanya pelatihan pegawai yang dilakukan secara baik oleh LPP TVRI Sumatera Selatan. Sementara aspek lain masih belum dilaksanakan dan belum ada transparansi.

Kualitas pegawai di LPP TVRI Sumatera Selatan khususnya kerabat kerja program Warta Sumsel dinilai sudah berhasil karena pegawai LPP TVRI Sumatera Selatan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam program Warta Sumsel. Pegawai telah memiliki pengalaman yang cukup banyak serta mengikuti berbagai macam pelatihan dalam upaya menambah pengetahuan tentang pertelevisian maupun produksi berita.

b. Informasi

Indikator informasi ini dinilai dengan 2 aspek, yaitu informasi yang diperoleh oleh segenap kerabat kerja terkait kebijakan standar program siaran, serta informasi kepada stakeholder dalam perannya sebagai pemantau program Warta Sumsel agar berita yang ditayangkan akurat dan sesuai standar program siaran.

Informasi yang diperoleh oleh kerabat kerja program Warta Sumsel masih berkaitan dengan transmisi pada indikator komunikasi. Dimana kerabat kerja belum mendapat informasi secara langsung melalui sosialisasi dan pelatihan khusus, sehingga informasi ini masih belum berhasil.

Berbeda dengan hal tersebut, informasi yang diberikan oleh LPP TVRI Sumatera Selatan kepada stakeholders dapat dikatakan berhasil. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh bahwa beberapa laporan tentang kesalahan pemberitaan dapat diselesaikan secara baik.

c. Kewenangan

Kewenangan dalam implementasi kebijakan standar program siaran pada LPP TVRI Sumatera Selatan ini akan dikaitkan dengan 3 hal, yaitu siapa yang bertanggung jawab, siapa yang member perintah, serta siapa yang berhak menegur kesalahan.

Hierarki kewenangan di LPP TVRI Sumatera Selatan tergolong baik karena adanya jenjang baik dalam pertanggungjawaban maupun dalam hal pengelolaan kesalahan. Akan tetapi memang masih ada oknum yang sering memainkan peran seolah menjadi orang yang berwenang untuk memberikan perintah kepada pegawai baru. Hal ini sebenarnya lebih kepada pribadi masing-masing orang.

Menyimpulkan dari fakta yang diperoleh di lapangan, kewenangan dapat dikatakan berhasil jika saja tidak ada lagi oknum-oknum yang membuat pola pemberian perintah menjadi tidak berjalan.

d. Fasilitas

Dalam implementasi kebijakan standar program siaran pada LPP TVRI Sumatera Selatan ini akan melihat kepada 3 hal penting dalam manajemen fasilitas, yaitu jumlah peralatan yang dimiliki, perawatan, serta pengadaan alat-alat produksi yang masih kurang atau tidak memadai.

Berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh di lapangan, ketiga aspek yang dilihat dalam manajemen fasilitas di LPP TVRI Sumatera Selatan belum ada yang berhasil. Peralatan khususnya peralatan produksi Program Warta Sumsel belum terorganisir dengan baik. Tidak ada kejelasan jumlah peralatan yang tersedia, juga kondisi peralatan apakah dalam keadaan baik atau

rusak. Data tentang peralatan hanya dapat dilihat pada beberapa ruangan saja, sementara bagian Perlengkapan menyatakan bahwa data secara keseluruhan tidak tersedia.

3. Disposisi

Disposisi dalam implementasi kebijakan standar program siaran pada Program Warta Sumsel di LPP TVRI Sumatera Selatan melihat pada dua aspek birokrasi yang penting dalam implementasi kebijakan, yaitu pengangkatan birokrat dalam hal ini adalah produser, serta pemberian insentif.

a. Pengangkatan Birokrat

Birokrat yang dimaksud dalam program Warta Sumsel adalah produser pelaksana selaku penanggung jawab penayangan program, serta kinerja produser tersebut berdasarkan penilaian dari atasan, bawahan serta sesama produser pelaksanaan itu sendiri.

Pengangkatan produser pada program Warta Sumsel belum memiliki ketentuan yang jelas. Seperti tidak adanya standar kompetensi atau uji kompetensi produser, standar pendidikan, atau standar lainnya yang berkaitan dengan kepemimpinan. Prosedur pengangkatan yang selama ini dilakukan adalah hanya dengan melihat pada senioritas dan kedekatan dengan pimpinan bukan pada profesionalitas. Oleh sebab itu, pengangkatan birokrat dikatakan belum berhasil. Meskipun memang pada kenyataannya pengangkatan produser ini tidak berdampak banyak pada implementasi kebijakan karena kualitas produser dan pegawai lainnya memang sudah baik.

b. Insentif

Salah satu cara untuk membuat seseorang dapat melaksanakan suatu kegiatan seperti yang diharapkan adalah dengan memberikan insentif. Dalam pengelolaan insentif ini ada 2 hal yang akan dilihat, yaitu jenis insentif yang diterima serta pola pembayarannya.

Pada program Warta Sumsel ada beberapa insentif yang diberikan yang dinilai masih dibawah standar jika dibandingkan dengan LPP TVRI di daerah lainnya. Akan tetapi, sebagai salah satu lembaga Negara, LPP TVRI seharusnya sudah mulai menerapkan sistem tunjangan kinerja kepada pegawainya sehingga tidak ada lagi honor kegiatan di luar gaji pegawai. Sistem tunjangan kinerja baru akan diterapkan pada tahun 2017. Sejauh ini, pola pembayaran insentif di LPP TVRI Sumatera Selatan, khususnya honor berita masih belum terjadwal.

Baik dilihat dari jenis insentif yang diberikan maupun pola pembayaran yang diterapkan belum berhasil dilakukan oleh LPP TVRI Sumatera Selatan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi yang dibahas dalam implementasi kebijakan standar program siaran pada Program Warta Sumsel di LPP TVRI Sumatera Selatan melihat kepada *standard operational procedures* (SOP) dan fragmentasi.

a. Standard Operational Prosedures (SOP)

SOP dibuat dengan tujuan untuk menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas,

yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan aturan-aturan. SOP yang dilihat adalah SOP pengawasan yang dilakukan oleh KPID Sumatera Selatan dan SOP penayangan program Warta Sumsel.

KPID Sumatera Selatan memiliki SOP yang jelas untuk setiap kegiatan yang dilakukan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu SOP yang dilaksanakan oleh KPID Sumatera Selatan dinilai telah berhasil. Sebaliknya, SOP yang dilaksanakan oleh LPP TVRI Sumatera Selatan dinilai belum berhasil karena SOP masih belum jelas. Kegiatan yang dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan saja.

b. Fragmentasi

Fragmentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya kewenangan yang sama pada Dinas atau lembaga yang berbeda. Hal ini dinilai dapat menghambat proses implementasi. Untuk implementasi kebijakan standar program siaran tidak ada lembaga lain yang terlibat kecuali KPI dan KPID. KPI dan KPID kemudian berkoordinasi dengan lembaga penyiaran pada masing-masing daerah. Pada program Warta Sumsel juga tidak ada lembaga atau organisasi lain yang mengintervensi, sehingga hanya menjadi kedaulatan produser dan LPP TVRI Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, kebijakan standar program siaran dapat berhasil dilaksanakan di LPP TVRI Sumatera Selatan khususnya pada Program Warta Sumsel.

George Edward III mengemukakan adanya empat (4) faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor ini bekerja secara simultan dan berintegrasi satu sama lain untuk membantu dan

menghambat implementasi kebijakan. Dikatakan bahwa implementasi suatu kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dan banyak variabel.

Komunikasi yang longgar menyebabkan para pelaksana untuk terus menemukan cara-cara yang lazim yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara komunikasi yang sangat terperinci mungkin mengurangi semangat dan kebebasan para pelaksana, menimbulkan penggantian tujuan dan memboroskan sumber-sumber yang tersedia, serta ketrampilan staf, kreativitas dan penyesuaian. Dengan demikian dampak dari komunikasi pada implementasi tidak hanya langsung, tetapi juga dirasakan melalui kaitan-kaitan dengan sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi.

Sumber-sumber berinteraksi dengan komunikasi dalam beberapa cara. Staf yang tidak memadai dapat menghalangi transmisi petunjuk-petunjuk kebijakan. Kurangnya informasi dari pejabat tinggi seringkali merupakan sebab keaburan dalam perintah implementasi. Persepsi dari para pelaksana terhadap komunikasi implementasi mungkin dihambat oleh kurangnya waktu untuk memberikan perhatian yang penuh kepada perintah. SOP sebenarnya merupakan bentuk reaksi terhadap keterbatasan sumber-sumber.

Disposisi para pelaksana akan berpengaruh pada bagaimana para pelaksana menafsirkan pesan-pesan komunikasi yang mereka terima. Cara pelaksana menafsirkan pesan komunikasi ini pada akhirnya akan berpengaruh kepada bagaimana mereka menyusun kembali pesan-pesan komunikasi untuk kemudian diteruskan kepada pejabat di bawahnya. Disposisi juga dapat berpengaruh terhadap penggunaan wewenang untuk melaksanakan kebijakan. Kecenderungan dari pelaksana mungkin akan mendorong penggunaan dan

pemeliharaan SOP yang menguntungkan bagi para pelaksana namun bertentangan dengan implementasi kebijakan.

Demikian pula struktur birokrasi. Struktur birokrasi pemerintahan yang terpecah-pecah akan meningkatkan probabilitas kegagalan komunikasi. Semakin banyak orang yang harus menerima perintah-perintah implementasi, maka semakin besar pula kemungkinan pesan tersebut akan ditafsirkan dengan sudut pandang yang berbeda-beda.

Implementasi kebijakan standar program siaran pada Program Warta Sumsel di LPP TVRI Sumatera Selatan sebagaimana telah di bahas pada sub bab sebelumnya, memenuhi kriteria belum baik jika ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rata-rata dari indikator yang diteliti. Akan tetapi hal ini justru menjadi menarik manakala pada implementasi di lapangan, justru hasil yang diterima oleh LPP TVRI Sumatera Selatan khususnya Program Warta Sumsel memenuhi kriteria sangat baik. Keberhasilan program Warta Sumsel bahkan telah diakui dengan meraih pemenang pada kategori program berita terbaik televisi dalam Anugerah Gemilang Penyiaran tahun 2016 yang diselenggarakan oleh KPID Sumatera Selatan.

Ada beberapa hal yang menjadikan Program Warta Sumsel menjadi unggul meskipun dengan keterbatasan, yaitu :

1. Sumber daya manusia yang handal dan berkompeten di bidangnya. Selain juga memiliki pengalaman yang sudah berpuluh tahun dalam pengelolaan produksi program televisi khususnya program berita.
2. Tidak adanya intervensi dari lembaga atau organisasi lain dalam penayangan program Warta Sumsel sehingga menyebabkan tidak adanya tekanan dalam setiap berita yang ditayangkan.

Dua hal tersebut menjadi kunci keberhasilan program Warta Sumsel dalam implementasi kebijakan standar program siaran meskipun dengan banyaknya keterbatasan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian di lapangan dan hasil pembahasan serta teori penunjang yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan standar program siaran pada Program Warta Sumsel di LPP TVRI Sumatera Selatan belum berjalan dengan baik, meskipun beberapa indikator telah didukung oleh KPID Sumatera Selatan.
2. Komunikasi yang dilakukan oleh LPP TVRI Sumatera Selatan hanya berdasarkan pada sosialisasi yang diberikan oleh KPID Sumatera Selatan, sementara KPID Sumatera Selatan hanya memberikan sosialisasi pada tingkat pimpinan saja. Meskipun para pelaksana program Warta Sumsel dapat mengetahui standar program siaran dari buku-buku pedoman yang diberikan.
3. Sumber daya yang dimiliki LPP TVRI Sumatera Selatan khususnya pada Program Warta Sumsel secara keseluruhan masih kurang, baik dari segi jumlah pegawai, informasi yang diperoleh oleh pegawai, fasilitas dan kewenangan yang diberikan. Namun demikian, LPP TVRI Sumatera Selatan khususnya program Warta Sumsel memiliki sumber daya manusia yang sangat baik dan berkompeten di bidangnya sehingga dapat menutupi sumber daya lainnya dan membuat stakeholders juga menjadi puas.

4. Disposisi dalam penelitian ini juga dinilai masih kurang. Pengangkatan produser yang belum memiliki kriteria dan prosedur yang jelas, ditambah dengan sistem pembayaran honor yang belum sesuai dengan standar instansi pemerintahan.
5. Struktur birokrasi dalam penelitian ini dinilai baik dan cukup mendukung implementasi kebijakan secara keseluruhan. KPID Sumatera Selatan sebagai satu-satunya lembaga pengawas penyiaran menjadi leluasa menjalankan fungsinya tanpa adanya kepentingan atau tumpang tindih kewenangan dengan instansi atau lembaga lainnya. Demikian pula LPP TVRI Sumatera Selatan yang menaungi Program Warta Sumsel, sebagai Lembaga Penyiaran Publik, TVRI tidak terikat dengan kepentingan politi atau sosial manapun sehingga independen. Meskipun LPP TVRI Sumatera Selatan khususnya pada program Warta Sumsel harus lebih memperhatikan *standard operational procedure* demi keberlangsungan dan regenerasi program Warta Sumsel.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti dalam Implementasi Kebijakan Standar Program Siaran pada Program Warta Sumsel di LPP TVRI Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPID Sumatera Selatan diharapkan dapat diberikan pada tingkat pelaksana seperti kamerawan, reporter dan editor langsung;
2. LPP TVRI Sumatera Selatan diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pelatihan bagi setiap pegawai yang direkrut sehingga ada standar lulus dan tidaknya dari pelatihan tersebut;

3. Fasilitas yang dimiliki oleh LPP TVRI Sumatera Selatan diharapkan dapat diperbaharui semuanya karena sudah tidak memenuhi standar. Hal ini dapat dilakukan jika data yang dimiliki oleh Bagian Perlengkapan sudah baik.
4. Pengangkatan produser program Warta Sumsel perlu memperhatikan kompetensi dan penilaian standar agar ada regenerasi.
5. Pemberian insentif diharapkan dapat disesuaikan dengan memberikan tunjangan kinerja kepada pegawai.
6. Setiap bidang di LPP TVRI Sumatera Selatan diharapkan memiliki standarisasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Islamy. 1997. *Kebijakan Pemerintah Sektor Publik*. Bandung : Remadja Rosda
- Hoogerwerf. 1993. *Publik of Policy*, 7 Edt. Scott. Atlanta : Foresman and Company.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Jurnal Komunikologi Volume 12. Nomor 1, (2015:45).
- Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan. Volume 16. Nomor 2, (2012:20)
- Opini Hukum Elektronik Journal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. (2013:1)
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/KPI/03/2012